

**BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TAMAN SARI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Taman Sari**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Taman Sari selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman Sari, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Taman Sari 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

- 1) Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
- 2) Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasie dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
- 3) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
- 4) Kurangnya koordinasi dengan stake holder terkait dalam penyelesaian pada kecamatan;
- 5) Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih minim;
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan IMB;
- 7) Belum optimalnya penerapan sanksi bagi bangunan yang belum memiliki IMB;
- 8) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- 9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

#### I. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (clarity of direction) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

#### **“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pangkalpinang yang **Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

**Unggul**, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (self determination), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (equality) dan pemerataan (equity).

**Makmur**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

## **II. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

### **1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.**

Misi ini akan menjadi paying dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

**2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.**

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

**3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.**

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakup e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)

**4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.**

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

**5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.**

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Taman Sari mengarah pada pencapaian unsur visi: Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 yaitu: **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*”** dengan tujuan Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Dengan indikator kinerja adalah “Indeks Reformasi Birokrasi”. Dengan sasarannya yaitu “ Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD  | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  | Faktor  |   |
|----|---|--|---|---|
|    |   |  | Penghambat  | Pendorong   |
| 1  | <b>Misi :</b><br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i> . | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;</li> <li>2. Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasie dalam penyelegaraan pemerintah kecamatan;</li> <li>3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat Kerja;</li> <li>2. Alokasi anggaran dari Pemerintah Kota;</li> <li>3. Komitmen dan kibijakan Walikota</li> </ol> |
| 2  | <b>Tujuan :</b><br>Meningkatkan Indeks Refotmasi Birokrasi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kurangnya koordinasi dengan stake holder terkait dalam penyelesaian pada kecamatan;</li> </ol>   |   |   |
| 3  | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatkan kualitas pelayanan public dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara          | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih minim;</li> <li>6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan IMB;</li> <li>7. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi bangunan yang belum memiliki IMB;</li> <li>8. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;</li> <li>9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat.</li> </ol> |   |   |

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)**

Renstra kecamatan tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Renstra kecamatan tidak merencanakan kegiatan dalam skala besar yang akan berdampak pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Taman sari sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
2. Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan;
3. Masih tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT)
4. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.